

Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi

# WEDANA

## PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA

**Penataan Kelembagaan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**  
*Rahyunir Rauf*

**Penataan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**  
*Srimaulidiah*

**Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak**  
*Khotami*

**Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi**  
*Fadlul Taufiq dan Syafhendry*

**Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu**  
*Data Wardana*

**Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membantu Kepala Desa Menyusun Rencana Pembangunan Desa**  
*Syaprianto dan Panca Setyo Prihatin*

**Studi Pelaksanaan Fungsi Rukun Tetangga Di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun**  
*M. Syawaluddin dan Monalisa*

**Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Sebagai Fasilitator Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Di Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu**  
*Afrizal dan Zaini Ali*

**Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir**  
*Muhammad Fikri dan Yendri Nazir*

**Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Desa Di Bidang Kesehatan Di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu**  
*Siti Patimah dan Yusri Munaf*

diterbitkan oleh :

**Laboratorium Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Islam Riau**



# WEDANA

**Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi**  
Terbit Dua Kali Setahun : Bulan April dan Bulan Oktober  
Semua Tulisan Dari Hasil Penelitian dan Kajian Analisis

## Dewan Redaksi

Andriyus, S.Sos, M.Si

## Mitra Bestari :

Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS (IPDN Jakarta)  
Prof. Dr. Drs. H. Khasan Effendy, M.Pd (IPDN Jakarta)  
Dr. Johny Peter Lengkong, M.Si (Univ. Samratulangi Manado)  
Dr. H. Irwan Waris, MA (Univ. Tadulako Palu)  
Dr. H. Sukarman Kamuli, M.Si (Univ. Negeri Gorontalo)  
Prof. Dr. H. Sufian Hamim, SH, M.Si (Universitas Islam Riau, Pekanbaru)  
Dr. H. Yusri Munaf, SH, M.Hum (Universitas Islam Riau, Pekanbaru)  
Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si (Universitas Islam Riau, Pekanbaru)  
Dr. H. Syafhendri, M.Si (Universitas Islam Riau, Pekanbaru)

## Editor Pelaksana :

Dra. Monalisa, M.Si, T. Rafizal. AR, S.Sos, M.Si, Drs. H. Zaini Ali, M.Si,  
Yendri Nazir, S.Sos, M.Si, Sri Maulidiah, S.Sos, M.Si, Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si,  
Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA, H.Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si,  
Khairul Rahman, S.Sos, M.Si, Budi Muliando, S.IP, M.Si, Khotami, S.Sos, M.Si,  
Zainal, S.Sos, M.Si, Rizky Setiawan, S.IP, M.Si

## Penanggung Jawab :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

## Penerbit :

Laboratorium Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

## DAFTAR ISI

Penataan Kelembagaan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa..... <i>Rahyunir Rauf</i>	1 – 15
Penataan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014..... <i>Sri Maulidiah</i>	16 – 26
Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Mare dan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ..... <i>Khotami</i>	27 – 36
Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi ..... <i>FadlulTaufiq dan Syafhendry</i>	37 – 47
Peranan Kepala Dusun dalam Membantu Tugas Kepala Desa Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu ..... <i>Data Wardana</i>	48 – 58
Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membantu Kepala Desa Menyusun Rencana Pembangunan Desa..... <i>Syaprianto dan Panca Setyo Prihatin</i>	59 – 70
Studi Pelaksanaan Fungsi Rukun Tetangga Di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun ..... <i>M. Syawaluddin dan Monalisa</i>	71 – 86
Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Sebagai Fasilitator Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Di Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu ..... <i>Afrizal dan Zaini Ali</i>	87 – 97
Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir ..... <i>Muhammad Fikri dan Yendri Nazir</i>	98 – 110
Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Desa Di Bidang Kesehatan Di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ..... <i>Siti Patimah Dan Yusri Munaf</i>	111 – 122

# ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM MEMBINA KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA DI DESA PULAU PADANG KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Fadlul Taufiq dan Syaahendry

Mahasiswa dan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Islam Riau

## ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan secara survey dengan menggunakan metode Kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor penghambat Kepala Desa dalam Membina Kehidupan masyarakat desa. Populasi dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum, Kepala Dusun, Badan Permusyawaratan Desa, Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Kepala keluarga menggunakan teknik sensus. Sedangkan Kepala Keluarga menggunakan sampling purposive (purposive sampling). Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, kuisisioner dan observasi. Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif secara deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan berdasarkan kondisi yang ada dilapangan penelitian. Selanjutnya untuk menambah pengumpulan data, penulis juga menggunakan Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa adalah Kurang Terlaksana. Adapun faktor penghambat pelaksanaan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa adalah Masih minimnya pengawasan Kepala Desa dalam arti membina kehidupan masyarakat, Banyaknya kegiatan-kegiatan masyarakat yang sifatnya positif, masih dirasakan kurang mendapatkan perhatian dari Kepala Desa dan kurangnya peran aktif masyarakat dan lembaga masyarakat dalam melakukan koordinasi dengan kepala Desa. Sehingga tugas kepala desa belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Tugas, Membina

## ABSTRACT

*This research is a descriptive study conducted survey using quantitative methods. The purpose of this study is to investigate the implementation and inhibiting factors in the Village Head Fostering rural community life. The population in this study is the village secretary, Head of Government Affairs, Head of Development, Head of Public Affairs, Chief of Hamlet, Village Consultative Body, Neighborhood, Rukun Warga, and the heads of families using census techniques. Meanwhile, Head of Family using purposive sampling (purposive sampling). The technique of collecting data through interviews, questionnaires and observations. This research uses descriptive quantitative technique, the research done by describing based on existing conditions in the field of research. Furthermore, to add to the collection of data, the authors also use Based on the research results can be concluded Analysis Duties Village Head in Foster Village Community Life is Less Done. The factors inhibiting the implementation of the execution of tasks of the village chief is still the lack of supervision of the Head of the village in terms of fostering community life, number of community activities that are positive, still less to the attention of the Village Head and kurangnya active role of communities and community organizations in coordination with the head Village. So the task of the village head has not been fully implemented.*

*Keyword : Implementation, Tasks, Fostering*

## PENDAHULUAN

Tujuan negara Republik Indonesia sebagai tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah untuk membentuk suatu pemerintahan Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut Asas Desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pemerintah Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara, mempertahankan dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan sebagai wujud dari penerapan otonomi desa, maka pemerintah pusat secara berjenjang sesuai dengan hierarkinya melimpahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah desa. Pada kewenangan dapat diartikan sebagai hak atau kekuasaan yang sah untuk bertindak atau melakukan sesuatu.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan. Kabupaten Kuantan Singingi dimekarkan dari Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagai implementasi pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dalam rangka mempercepat pembangunan, memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hingga pada gilirannya akan dapat mewujudkan pemerataan

pembangunan bagi masyarakat disegala sektor secara bertahap dan berkesinambungan menuju cita-cita nasional sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerataan pembangunan sebagaimana dimaksud adalah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup guna membebaskan masyarakat dari kemiskinan, kebodohan dan keterbatasan infrastruktur, Kabupaten Kuantan Singingi pada saat ini memiliki 15 Kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Singingi. Kecamatan Singingi sebelum dimekarkan menjadi dua Kecamatan yakni Kecamatan Singingi dan Kecamatan Singingi Hilir memiliki 1 kelurahan dan 24 Desa. Sedangkan setelah dimekarkan Kecamatan Singingi terdiri dari 1 Kelurahan dan 13 Desa, ibu kota Kecamatan Singingi adalah Muara Lembu merupakan pusat pemerintahan, perekonomian, perbankan, sosial budaya kemasyarakatan di tingkat Kecamatan.

Desa Pulau Padang merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Singingi yang merupakan bagian dari Kabupaten Kuantan Singingi. Luas wilayah Desa Pulau Padang ± 65 Ha dengan memiliki batas wilayah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Petai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Muara Lembu
- Sebelah barat berbatasan dengan Pangkalan Indarung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Muara Lembu

Secara administratif Desa Pulau Padang terbagi dalam 2 dusun yaitu Dusun Koto Tuo dan Dusun Koto Tinggi. Desa Pulau Padang terbagi dalam 4 RT dan 2 RW. Desa pulau terletak pada koordinat 101.191484 LS/LU - 0.474263 BT.BB.

Dalam peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa pasal 9 ayat (1), Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan. Selanjutnya pasal 9 ayat (2), dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan Desa ;

- c. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- d. Membina kehidupan masyarakat desa;
- e. membina perekonomian desa ;
- f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya ;
- g. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan ;
- h. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

Dari uraian diatas, maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada membina kehidupan masyarakat desa. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa pada pasal 11, untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan 10, Kepala Desa mempunyai fungsi :

1. Menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa ;
2. Menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa ;
3. Memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat ;
4. Menciptakan suasana kentrangan dan ketertiban masyarakat.

Sebagaimana diuraikan pada uraian terdahulu Kepala Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa. Makna membina kehidupan masyarakat ini luas, namun dalam hal ini peneliti memfokuskan pada pembinaan pada bidang agama, kesehatan dan pembinaan ketentramandan ketertiban.

Berikut penulis paparkan pada tabel dibawah ini mengenai kegiatan pembinaan terhadap masyarakat sebagaimana data tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Pembinaan Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Di Desa Pulau Padang**

No	Jenis kegiatan Pembinaan	Tahun dan Jumlah		
		2011	2012	2013
1.	Pembinaan Agama	-	1	-
2.	Pembinaan Kesehatan	1	2	1
3.	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	1	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

Sumber : Kantor Desa Pulau Padang, 2014.

Dari tabel I.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Desa dari tahun ke tahun belum menunjukkan peningkatan, adapun fenomena yang dijumpai adalah sebagai berikut :

- a. Adanya indikasi dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat desa masih dirasakan belum efektif. Hal ini ditandai dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan seperti pengajian untuk masyarakat belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.
- b. Disamping pembinaan bersifat keagamaan, masalah pembinaan di bidang kesehatan juga belum dirasakan maksimal. Hal ini disebabkan minimnya kejelasan mengenai kegiatan posyandu.
- c. Adanya indikasi pengawasan yang dilakukan Kepala Desa mengenai keadaan membina kehidupan masyarakat dirasakan belum maksimal.

Syafie (2011;20) Pemerintahan berasal dari kata Pemerintah, yang paling sedikit kata "perintah" tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Sedangkan menurut Ndraha (2011;5) Pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil. Musanef (dalam Syafie, 2008;9) Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas dan masyarakat yang berkepentingannya diwakili oleh dinas tersebut.

Sedangkan Syafie (2011;23) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan

(eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar. Chaidir (2008;84) kata pemerintahan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam arti luas pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan, memelihara keamanan dan meningkatkan derajat kehidupan rakyat serta dalam menjamin kepentingan negara itu sendiri. Dalam konteks fungsi Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif pengertian pemerintahan mencakup ke semua fungsi tersebut diatas. Dalam arti sempit hanya menyangkut fungsi Eksekutif saja. Soemandar (dalam Syafiie, 2011;8) Pemerintahan adalah sebagai bahan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah musti memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitamasi.

Jones (dalam Winarno 2012;19) istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Budiardjo (2008;20) Kebijakan (*policy*) adalah kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Adapun menurut Dye (dalam Adisasmita 2011;113) Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*).

Wewenang atau kekuasaan adalah padanan kata *authority*, yaitu "*the power or right delegated or given; the power to judge, act or command*" (kewenangan atau hak untuk mewakili, bertindak atau memerintah). Sehingga dari kata tersebut terbentuk kata sifat *authoritative*. Webber (dalam Ndraha, 2003:85) yang dianggap sebagai bapak birokrasi, membangun teori disebut dengan kekuasaan. Dimana Webber berpendapat bahwa ada tiga macam tipe ideal wewenang yang pertama, tradisional, kedua wewenang kharismatik, dan ketiga legal rasional. Yang terakhir inilah yang menjadi basis wewenang pemerintahan.

Soekanto (2009;243) wewenang ada beberapa bentuk yaitu, wewenang kharismatik, wewenang tradisional, dan wewenang rasional (*legal*).

- a. Wewenang Kharismatik  
Wewenang Kharismatik merupakan wewenang yang didasarkan pada kharisma, yaitu kemampuan khusus (wahyu, peluang) yang ada pada diri seseorang.
- b. Wewenang Tradisional  
Soekanto (2009;245) ciri-ciri utama wewenang tradisional adalah sebagai berikut :
  1. Adanya ketentuan-ketentuan tradisional yang mengikat penguasa yang mempunyai wewenang, serta orang-orang lain dalam masyarakat.
  2. Adanya wewenang yang lebih tinggi ketimbang kedudukan seseorang yang hadir secara pribadi.
  3. Selama tidak ada pertentangan dengan ketentuan-ketentuan tradisional, orang-orang dapat bertindak secara bebas.
- c. Wewenang Rasional (*Legal*)  
Wewenang rasional atau *legal* adalah wewenang yang didasarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Pembinaan dalam tulisan ini diartikan sebagai rangkaian upaya dan metoda yang dikembangkan untuk meningkatkan baik wawasan maupun keterampilan personil organisasi. Konsep pembinaan juga dapat dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasi. Widjaja (2001;139) mengatakan bahwa pembinaan adalah suatu proses pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha perbaikan, dan akhirnya mengembangkan, dengan demikian pembinaan adalah sejauh mana dari kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, penyusunan program, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dengan semaksimal mungkin.

Adapun pembinaan menurut Winkel (2002;29) disebutkan bahwa pembinaan adalah bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa agar dia mencapai kedewasaan. Secara sederhana pembinaan merupakan suatu aktivitas sadar dari orang dewasa guna membantu dan membimbing orang yang belum dewasa agar menjadi dewasa, baik jasmani maupun rohani. Sedangkan menurut efendi (2003;24) mengemukakan bahwa pembinaan adalah usaha memelihara, melatih, dan meningkatkan menjadi lebih baik.

Selanjutnya efendi (2003;25) bahwa pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain:

1. Bimbingan
2. Pengawasan
3. Pengarahan
4. Pelatihan

Crow (dalam Pasla, Skripsi Ilmu Pemerintahan, 2013;22) bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada suatu individu melalui pendidikan dan petunjuk, agar yang diberikan bimbingan dapat memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan persoalan-persoalan sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Siagian (dalam Pasla, Skripsi Ilmu Pemerintahan, 2013;22) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengarahan yaitu kegiatan untuk menggerakkan orang lain supaya bisa dan dapat bekerja dengan baik dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan, member masukan kepada anggotanya sehingga dapat menunjang tingkat pengetahuannya.

Ismail (2001;154) menyatakan bahwa tata cara pembinaan adalah :

1. Dengan menggunakan media masa baik dalam arti media cetak maupun elektronik. Tujuan agar teknik ini dapat menjangkau penerima sebanyak mungkin dengan biaya yang relatif mudah.
2. Dengan melakukan kunjungan yaitu tata cara berkomunikasi dari satu orang ke orang lain dengan mengadakan kunjungan.

Miftah menjelaskan salah satu teknik perilaku organisasi yang diperlukan untuk melakukan perubahan adalah pembinaan organisasi atau dikenal dalam literatur Pembinaan menurut Thoha (2003;182) adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Ada dua unsur dari pengertian ini, yakni pertama, pembinaan itu biasa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan dan kedua, pembinaan kepada perbaikan atau sesuatu.

Menurut bimo, bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya (2012, maret 26, eddytvllankz.blogspot.com)Selanjutnya Sofyan S. Will mengatakan bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu yang

mebutuhkannya. Bantuan tersebut diberikan secara bertujuan, berencana dan sistematis, tanpa paksaan melainkan atas kesadaran individu tersebut, sehubungan dengan masalahnya (2012, maret 26, eddytvllankz.blogspot.com). Lebih lanjut andi Mappiare berpendapat bahwa bimbingan merupakan serangkaian kegiatan paling pokok bimbingan dalam membantu konseli/klien secara tatap muka, dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus (2012, maret 26, eddytvllankz.blogspot.com).

Winardi (2000;585) "Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan". Sujamto (dalam Silalahi, 2002,177) lebih tegas mengatakan: pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki serta sesuai pula dengan segala ketentuan dan kebijakan yang berlaku. Sementara Ukas (2004:337) menyatakan bahwa: "Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan".

Menurut George R. Terry "*actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing effort.*"(Pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerjasama dengan secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian).(2011, Desember 2, <http://fajarmns.wordpress.com>, pengarahan). Menurut Siagian, istilah motivating sudah mencukup adanya usaha mensinkronkan tujuan organisasi dengan tujuan-tujuan pribadi para anggota organisasi. Para bawahan pelaksana dalam memberikan jasa-jasanya memerlukan beberapa macam *perangsang*, karena sebagai manusia mereka mempunyai dua macam kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan yang berbentuk materi, dan yang nonmateri. Kebutuhan-kebutuhan ini perlu mendapat perhatian pemimpin organisasi, dan yang sangat mendasar adalah dengan cara pemberian *motivasi* dalam mengarahkan/menggerakkan mereka. (2011, Desember 2, <http://fajarmns.wordpress.com>, pengarahan).



Soetardjo dan Yulianti (dalam Wasistiono dan M. Irwan Tahir, 2007:7) kata "desa" berasal sendiri berasal dari bahasa India yakni "swadesi" yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Sedangkan Bintarto (dalam Nurcholis, 2011:4) Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan cultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

Selanjutnya menurut Soenardjo (dalam Nurcholis, 2011:4) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan

batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Sedangkan Nurcholis (2011:4) desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan secara survey dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau suatu fenomena. Penelitian ini diidentikkan dengan penelitian yang menggunakan pertanyaan "Bagaimana" dalam mengembangkan informasi yang ada. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah :

- a. Menggambarkan mekanisme sebuah proses.
- b. Menciptakan seperangkat kategori atau pola.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Padang. Adapun pertimbangan menetapkan lokasi penelitian di desa ini adalah karena penulis lebih memahami situasi dan kondisi Desa di Kecamatan Singingi, yang mana didesa tersebut dijumpai fenomena kehidupan masyarakat yang menarik untuk diteliti.

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Umum, BPD, RT, RW dan Kepala Keluarga yang sekaligus dijadikan sampel. Sedangkan Kepala Desa dijadikan *Key Informan* (informasi kunci). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk Sekretaris Desa, Kaur, RT, RW dan Kepala Dusun termasuk anggota BPD menggunakan teknik sensus, yaitu teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan atau dijadikan sebagai sampel. Sedangkan Kepala Keluarga menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan pertimbangan bahwa responden yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan tujuan penelitian ini.

Adapun cara yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah teknik :

- a. Interview (wawancara)

Yaitu teknik dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan secara mendalam yang dianggap mengerti permasalahan yang diteliti. Wawancara yang dimaksud adalah wawancara penulis dengan Kepala Desa Pulau Padang yaitu Anton Putra.

- b. Kuisisioner (angket)

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Responden tersebut berjumlah 34 orang yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Umum, Kepala Dusun, BPD, RT, RW, dan Kepala Keluarga. Adapun tata cara penulis dalam penyebaran kuisisioner ini adalah dengan memberikan waktu  $\pm$  4 hari kepada responden untuk mengisi kuisisioner.

- c. Observasi

Yaitu sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri-ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisisioner. Kalau wawancara dan kuisisioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam lain.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Deskripsi Singkat Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuansing disebut pula

dengan rantau kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang minangkabau (Rataunan tigo jurai). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa minangkabau. Kabupaten Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten

Indragiri Hulu setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan.

**Tabel. 2**  
**Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Sejak Pertama Berdiri Sampai Sekarang.**

No	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1.	Drs. H. Rusdji S Abrus	1999 s/d 2001	Sebelum pejabat bupati kemudian menjadi defenitif
2.	Drs. H. Asrul Ja'afar	2001s/d 2005	Sebelumnya menjadi wakil bupati kemudian menggantikan bupati yang meninggal
3.	H. Sukarmis	2006 s/d sekarang	Jabatan periode ke dua

Sumber : Wikipedia, 2014.

### Kecamatan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi di mekarkan dari Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagai implementasi pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dalam rangka mempercepat pembangunan, memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hingga pada gilirannya akan mewujudkan pemerataan pembangunan bagi masyarakat disegala sektor secara bertahap dan berkesinambungan menuju cita-cita nasional sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerataan pembangunan sebagaimana dimaksud adalah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup guna membebaskan masyarakat dari kemiskinan, kebodahan dan keterbatasan infrastruktur, Kabupaten Kuantan Singingi pada saat ini memiliki 15 Kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Singingi.

Kecamatan Singingi sebelum dimekarkan menjadi dua Kecamatan yakni Kecamatan Singingi dan Kecamatan Singingi Hilir memiliki 1 Kelurahan dan 24 Desa. Sedangkan setelah dimekarkan Kecamatan Singingi terdiri dari 1 Berdasarkan data administrasi Desa Pulau Padang, jumlah penduduk berjumlah 1295 dengan rincian 679 jenis kelamin laki-laki dan 616 jenis kelamin perempuan. Untuk lebih jelasnya berikut penulis paparkan pada tabel dibawah ini.

Kelurahan dan 13 Desa, ibu kota kecamatan Singingi adalah Muara Lembu merupakan pusat pemerintahan, perekonomian, perbankan, sosial budaya kemasyarakatan di tingkat Kecamatan.

### Desa Pulau Padang

Desa Pulau Padang merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Singingi. Luas wilayah Desa Pulau Padang ± 65 Ha dengan memiliki batas wilayah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Petai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Muara Lembu
- Sebelah barat berbatasan dengan Pangkalan Indarung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Muara Lembu

Secara administratif Desa Pulau Padang terbagi dalam 2 dusun yaitu Dusun Koto Tuo dan Dusun Koto Tinggi. Desa Pulau Padang terbagi dalam 4 RT dan 2 RW. Desa pulau terletak pada koordinat 101.191484 LS/LU - 0.474263 BT/BB. Jarak tempuh dari pusat pemerintahan Kecamatan 3 Km, jarak dari pusat pemerintahan ibukota kabupaten 32 Km, dan jarak dari ibukota Provinsi 125 Km.

Pemerintah Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, melayani, memelihara, mempertahankan dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka. Aspek kehidupan masyarakat desa biasanya yang utama adalah hukum adat (istiadat) tertulis maupun tidak tertulis, sosial

budaya kemasyarakatan, ekonomi pertanian-perkebunan-perikanan-perdagangan, ketertiban, keamanan dan pertahanan diri, serta pemerintahan. Pemerintah desa merupakan bentuk formalisasi organisasi kelembagaan masyarakat desa. Kehadiran pemerintah desa merupakan pemenuhan kebutuhan eksistensi masyarakat desa.

Pemerintah Desa yang diberikan kepercayaan masyarakat tidak cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat banyak. Kedudukan dan bentuk organisasinya yang mendua (*ambivalen*) yaitu antara bentuk organisasi pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan, tidak adanya sumber pendapatan yang memadai, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut isi rumah tangganya, keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya, merupakan sebagian kendala yang menghambat kinerja Pemerintah Desa. Maka selanjutnya akan diuraikan secara terperinci mengenai tugas

Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu :

### 1. Bimbingan

Suatu rencana kerja yang baik tentu harus diawali dengan berbagai informasi terutama dari mereka yang akan dijadikan obyek dari pembangunan itu sendiri. Hal ini diperlukan bila pembangunan untuk masyarakat maka keinginan masyarakatlah yang harus dijadikan acuan bagi penyusunan berbagai program pembangunan Kepala Desa. Menyadari tingkat pengetahuan masyarakat Kepala Desa relatif rendah karena itu pembinaan dari Kepala Desa sangat diperlukan terutama melalui pembinaan atau bimbingan bagi kehidupan masyarakat yang ada di Desa.

Sehubungan dengan pemberian bimbingan berdasarkan temuan di lapangan, berikut penulis paparkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3  
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Bimbingan

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	Pemberian Petunjuk	5	11	18	34
2.	Memberikan Masukan	7	15	12	34
Jumlah		12	26	30	68
Rata-Rata		6	13	15	34
Persentase		17,64%	38,23%	44,12%	100%

Sumber : Data Olahan, 2015

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Pulau Padang yaitu dengan Anton Putra, dapat diperoleh informasi :

*saya akui, mengenai pemberian bimbingan berupa pemberian petunjuk dan masukan dalam bidang sosial yang meliputi keagamaan, kesehatan, dalam hal ini masih kurang saya lakukan. Namun, dalam hal arahan secara lisan sering saya lakukan. Untuk contoh ketika ada pertemuan di kantor desa, saya sering mengingatkan dan mengajak untuk selalu bahu membahu dalam membina kehidupan bermasyarakat (10 Februari 2015\_09.00 Wib)*

Adapun hasil observasi yang penulis lakukan mengenai pemberian bimbingan kepada masyarakat masih dirasakan kurang terlaksana. Hal ini ditandai dengan minimnya kegiatan mengenai pemberian petunjuk kepada masyarakat dalam bidang keagamaan, kesehatan, dan bidang sosial lainnya. Penulis

juga melakukan wawancara tidak terstruktur dengan salah satu responden yaitu Haikal dalam hal pemberian bimbingan, beliau mengatakan : *Sepengetahuan saya, pembinaan kehidupan masyarakat desa dalam hal pemberian petunjuk dalam segi keagamaan, kesehatan, dan masalah sosialnya belum sepenuhnya dilaksanakan oleh kepala desa. Dan juga mengenai pemberian masukan juga belum sepenuhnya dilaksanakan oleh kepala desa. (15 Februari 2015\_09.30 Wib).*

Dari hasil kuisioner, wawancara dan observasi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa khususnya mengenai pemberian bimbingan dikategorikan Kurang Terlaksana, karena 44,12% berada pada kategori 34 - 66%.

### 2. Pengawasan

Berdasarkan hasil temuan atau penelitian lapangan, maka diperoleh data jawaban responden sebagai berikut :

Tabel. 4  
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pengawasan

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	Mengawasi Kegiatan	4	20	10	34
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>34</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>4</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>34</b>
<b>Persentase</b>		<b>11,76%</b>	<b>58,82%</b>	<b>29,41%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan, 2015

Hasil dari tabel diatas dapat dijelaskan 11,76% mengatakan terlaksana, kemudian 58,82% mengatakan kurang terlaksana dan selanjutnya 29,41% mengatakan tidak terlaksana. Adapun rincian distribusi jawaban responden mengenai mengawasi kegiatan adalah 4 orang responden mengatakan terlaksana dengan jawaban survei kelapangan, melakukan koordinasi dengan penegak hukum. 20 orang mengatakan kurang terlaksana dengan alasan responden ragu-ragu-ragu dalam memberikan jawaban dan 10 orang mengatakan tidak terlaksana dengan alasan responden tidak tahu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Pulau Padang yaitu dengan Anton Putra, dapat diperoleh informasi :

*Dalam hal pengawasan, saya pernah melakukan pengawasan mengenai keamanan dan ketertiban. Untuk contoh pengawasan langsung dalam pendirian pos ronda serta pengawasan kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya (10 Februari 2015\_10.00 Wib)*

Adapun hasil observasi yang penulis lakukan mengenai pengawasan kepada

### 3. Pengarahan

Berdasarkan hasil temuan atau penelitian lapangan, maka diperoleh data jawaban responden sebagai berikut:

Tabel. 5  
Distribusi Jawaban responden mengenai Pengarahan

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	Menggerakkan	17	11	6	34
2.	Mengatur	13	9	12	34
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>68</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>15</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>34</b>
<b>Persentase</b>		<b>44,12%</b>	<b>29,42%</b>	<b>26,47%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan, 2015

masyarakat masih dirasakan kurang terlaksana. Hal ini ditandai dengan minimnya pengawasan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemasyarakatan. Untuk contoh mengenai pembinaan keagamaan, minimnya pengawasan sehingga tidak optimalnya kegiatan tersebut. Pengawasan yang lemah mengakibatkan mandeknya atau tidak berjalannya kegiatan tersebut..

Penulis juga melakukan wawancara tidak terstruktur dengan salah satu responden yaitu Irwan dalam hal pengawasan, beliau mengatakan :

*Sepengetahuan saya sebagai warga Desa Pulau Padang, mengenai pengawasan dalam hal membina kehidupan masyarakat. Menurut saya, kinerja Kepala Desa lumayan berjalan efektif. (16 Februari 2015\_10.00 Wib)*

Dari hasil kuisisioner, wawancara dan observasi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa khususnya mengenai pengawasan dikategorikan Kurang Terlaksana, karena 58,82% berada pada kategori 34 - 66%.

Hasil dari tabel diatas dapat dijelaskan 41,12% mengatakan terlaksana, kemudian 29,42% mengatakan kurang terlaksana dan selanjutnya 26,47% mengatakan tidak terlaksana. Adapun rincian distribusi jawaban responden mengenai menggerakkan adalah 17 orang responden mengatakan terlaksana dengan rincian 5 orang mengatakan seperti lomba rabana, pembuatan sarana olahraga, turnamen atau pertandingan bola voli, acara halal bil halal, dan menjaga keamanan dan keteriban. 11 orang responden mengatakan kurang terlaksana dengan alasan responden ragu-ragu dalam memberikan jawaban dan 6 orang responden mengatakan tidak terlaksana dengan alasan tidak tahu. Sedangkan untuk mengatur, 13 orang mengatakan terlaksana dengan rincian 2 orang mengatakan kegiatan olahraga sedangkan 11 orang hanya melingkari jawaban yang ada dikuisisioner tanpa memberikan tanggapan. 9 orang responden mengatakan tidak terlaksana dengan alasan responden ragu-ragu dalam memberikan jawaban. Dan 12 orang responden mengatakan tidak terlaksana dengan alasan responden tidak tahu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Pulau Padang yaitu dengan Anton Putra, dapat diperoleh informasi :

*Mengenai pengrahan dalam membina kehidupan masyarakat, yang pernah saya lakukan adalah memberikan langkah-langkah terhadap berbagai kehidupan masyarakat. Untuk contoh adalah*

*menanggulangi keamanan lingkungan, arahan RT/RW dalam menjaga keamanan dan ketertiban, dan kegiatan yang bersifat kepemudaan dengan tokoh pemuda.(10 Februari 2015\_10.30 Wib).*

Adapun hasil observasi yang penulis lakukan mengenai pengarahannya kepada masyarakat sejalan dengan hasil kuisisioner. Hal ini ditandai dengan minimnya masalah lingkungan di Desa Pulau Padang. Mengenai kegiatan yang bersifat kepemudaan, seperti kegiatan halal bil halal, olahraga yang sifatnya membina kehidupan masyarakat memang pernah dilakukan. Penjelasan ini penulis dapatkan dengan melakukan wawancara tidak terstruktur dengan tokoh pemuda Desa Pulau Padang yaitu Riko. Namun disisi lainnya, kegiatan yang bersifat keagamaan dan kesehatan masih belum mendapatkan perhatian dari kepala desa.

Dari hasil kuisisioner, wawancara dan observasi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa khususnya mengenai pengarahannya dikategorikan **Kurang Terlaksana**, karena 44,12% berada pada kategori 34 - 66%.

Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel.6**  
**Rekapitulasi Tanggapan responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	Bimbingan	17	11	6	34
2.	Pengawasan	4	20	10	34
3.	Pengarahan	15	10	9	34
Jumlah		25	43	34	102
Rata-Rata		8,3	14,3	11,3	34
Persentase		24,41%	42,06%	33,24%	100%

Sumber : Data Olahan, 2015

Berdasarkan dari tanggapan responden diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan

Singingi di kategorikan **Kurang Terlaksana**, karena 42,06% berada pada kateogori 34 - 66%.

**Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Membina Kehidupan**

### Masyarakat Desa di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Adapun faktor penghambat pelaksanaan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat adalah :

1. Masih minimnya pengawasan Kepala Desa dalam arti membina kehidupan masyarakat.
2. Banyaknya kegiatan-kegiatan masyarakat yang sifatnya positif, masih dirasakan kurang mendapatkan perhatian dari Kepala Desa.
3. Kurangnya peran aktif masyarakat dan lembaga masyarakat dalam melakukan koordinasi dengan Kepala Desa. Sehingga tugas kepala desa belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil Penelitian yang penulis lakukan mengenai Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi maka dapat disimpulkan Hasil penelitian dikategorikan "**Kurang Terlaksana**".
2. Adapun faktor penghambat adalah :
  - a. Masih minimnya pengawasan Kepala Desa dalam arti membina kehidupan masyarakat.
  - b. Banyaknya kegiatan-kegiatan masyarakat yang sifatnya positif, masih dirasakan kurang mendapatkan perhatian dari Kepala Desa.
  - c. Kurangnya peran aktif masyarakat dan lembaga masyarakat dalam melakukan koordinasi dengan Kepala Desa. Sehingga tugas kepala desa belum sepenuhnya dapat dilaksanakan

#### Saran

1. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, saran sekaligus pembenahan dalam arti membina kehidupan masyarakat.
2. Dengan adanya regulasi yang mengatur mengenai membina kehidupan masyarakat dapat dijadikan pedoman bagi kepala desa dalam menjalankan kegiatan tersebut.

### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adisasmita, Rahardjo, 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta. Graham Ilmu
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

- Awang, Azam dan Mendra Wijaya. 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru. Alaf Riau.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Chaidir, Ellydar. 2008. *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta. Total Media.
- Hendrawan 2001, *Pengembangan Organisasi*. Jakarta, Pustaka Raya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta. Erlangga.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: Erlangga.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Janah. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Supriyatno, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*. Tangerang: CV. Media Berlian.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung. PT. Reflika Aditama.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Perbandingan Pemerintahan*. Bandung. PT. Reflika Aditama.
- Thoha, Mifta. 2003. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2012. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta. Rajawali Pres.
- Ukas, Maman 2004. *Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Bandung : Penerbit Agnini.
- Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV. Fokusmedia.
- Widjaja, HAW. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang asli Bulat dan Utuh*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Winardi, 2000, *Manajer dan Manajemen*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Winkel.2002. *Dampak Pembangunan dan Pendidikan terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Daerah*. Yogyakarta, DEPDIBUD.



**JURNAL WEDANA** yang dikelola oleh Lab. PSIP merupakan jurnal yang diterbitkan berkala dua kali dalam satu tahun. Jenis jurnal yang diterbitkan dari segi sistematika penulisan dan isinya memuat (1) artikel hasil penelitian, dan (2) artikel gagasan konseptual (artikel hasil pemikiran). **WEDANA** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna; "pembantu pimpinan wilayah Daerah Tingkat II (kabupaten), membawahkan beberapa camat; pembantu bupati". Pengertian ini dalam ilmu pemerintahan termasuk didalam makna kepemimpinan wilayah, yang selanjutnya kata **Wedana** diberikan imbuhan menjadi **KEWEDANAN** yang bermakna daerah (kantor, rumah) **wedana**. Pengertian ini dalam kanzah ilmu pemerintahan termasuk didalam makna otonomi, pemerintahan daerah atau bermakna wilayah pemerintahan. Secara historis, **wedana** adalah wilayah administrasi pemerintahan yang berada dibawah kabupaten dan diatas kecamatan yang berlaku pada masa Hindia-Belanda dan beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia yang dipakai di beberapa provinsi. **Wedana** merupakan jenjang kepangkatan dalam pemerintahan masa lalu (di Jawa) yang mungkin kedudukannya setara dengan pembantu bupati. Wilayah yang dipimpin umumnya lebih luas daripada cakupan wilayah kecamatan zaman sekarang. Tetapi bisa dipastikan bahwa wilayah yang dipimpinnya lebih kecil daripada kabupaten. Maka dengan setiap makna tersebut, Jurnal dengan nama **WEDANA** merupakan perwakilan melalui penamaan untuk menggambarkan kajian yang melingkupi ilmu pemerintahan. Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan telah menyusun menjadi suatu hal yang baku untuk dijadikan panduan oleh penulls sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk mempublikasikan tulisannya kedalam **JURNAL WEDANA**. Pengelolaan **JURNAL WEDANA** merupakan kewenangan dari Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.